

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri A 1970 Nr 6

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH No. 5 tahun 1970.

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang Pemberian tunjangan-kerdja untuk meningkatkan produktivitas pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Terhadap Pegawai daerah Propinsi Djawa-Tengah berlaku mutatis-mutandis Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1970 No .B.114 / S.D / 1/3 / 1970 tentang Pemberian tunjangan-kerdja untuk meningkatkan produktivitas pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 1970.

Semarang, 24 Maret 1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH;
Ketua,**

H. IMAM SOFWAN

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI DJAWA-TENGAH,**

MOENADI

Maj . Djen. T.N.I. .

**Diundangkan pada tanggal 20 September 1970:
Sekretaris Daerah,**

M.S. DJOENAEDI S.H.

DISAHKAN

**Keputusan Menteri Dalam Negeri 6 Agustus 1970 No.
Pemda 10/19/2-216.**

**Direktur Pemerintahan Daerah,
SOEKANDAR UMAR S.H. (lc).**

PENDJELASAN

1. Umum.

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No.18 tahun 1961 L.N. No. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan (2) U.U. No. 18 tahun 1965, jo U.U. No.6 tahun 1969, tidak memungkinkan dinjatakannya peraturan-peraturan kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis berlaku bagi Pegawai Pemerintah Daerah.

Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

2. Pasal demi pasal.

Pasal 1 : Tjukup djelas

Pasal 2 : mulai berlakunya Peraturan Dacrah ini sama dengan mulai berlakunya Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Maret 1970 No. B. 114 / S.D. /1 / 3 / 1970 tentang pemberian tundjangan-kerja untuk meningkatkan produktivitas pegawai Negeri Sipil.